

Optimalisasi Kompetensi Kepemimpinan Nasional di Kabupaten Bantaeng yang Visioner dapat Memperkuat Otonomi Daerah

Dr. H. Ilham Syah Azikin, M.Si.

Bupati Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Alumnus P3DA 10

Abstrak

Pasca era reformasi dan memasuki era globalisasi saat ini, kualitas para pemimpin kembali dihadapkan terhadap tantangan yang semakin berat. Seiring dengan perjalanan reformasi tersebut, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemimpin di Kabupaten Bantaeng secara struktural merupakan pemimpin formal masyarakat di daerah dan berperan mutlak sebagai penyelenggara negara, yang sekaligus sebagai ujung tombak birokrasi negara dalam melaksanakan pembangunan nasional di daerah guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kompetensi yang dimiliki para pemimpin di Kabupaten akan semakin optimal bila semua ornamen penyelenggaraan negara dan pemerintahan seperti sinergi dengan pemerintah pusat, para tokoh baik itu tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat serta seluruh stakeholders yang ada. Bila dihadapkan dengan era globalisasi yang sangat cepat berubah, diperlukan komitmen dalam melaksanakan pembangunan dari para pemimpin untuk memanfaatkan setiap potensi yang ada. Untuk itu, para pemimpin harus terus berupaya mengemban amanat sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat sehingga terwujud pemimpin yang dapat dipercaya. Demikian pula yang terpenting adalah memberikan keteladanan di dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap segala bentuk perundang-undangan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Dengan demikian akan terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, berkredibilitas dan bebas KKN.

Kata kunci: Kepemimpinan, Otonomi Daerah, Kabupaten Bantaeng, Bebas KKN



ilustrasi: freepik.com

PENDAHULUAN

Kondisi pemimpin nasional dalam melaksanakan pembangunan, pernah menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan kehidupan yang cukup layak selama orde baru, terlepas dari berbagai kelemahannya selama periode pemerintahan yang dianggap otoriter tersebut. Namun sejak terjadinya krisis, kondisi pembangunan yang dilakukan di hampir aspek kehidupan masyarakat, masih belum maksimal untuk menjangkau sebagian rakyat Indonesia seperti yang diharapkan. Memasuki era globalisasi saat ini dan diiringi dengan era reformasi, kualitas para pemimpin kembali dihadapkan terhadap tantangan yang semakin berat. Seiring dengan perjalanan reformasi tersebut, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara

proporsional untuk mengatur rumah tangga daerah yang bersangkutan dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Hal ini membuat wacana penyelenggaraan pemerintahan daerah harus melakukan perubahan dan penyesuaian. Perubahan dan penyesuaian tersebut tidak saja menyangkut struktur pemerintahan di daerah, tetapi juga perubahan dalam mekanisme kepemimpinan Kepala Daerah. Persoalannya adalah bahwa implementasi kebijakan yang diturunkan oleh Undang-undang Otonomi Daerah tersebut tidak hanya menyangkut aspek fungsi dan tanggung jawab Kepala Daerah saja, tetapi yang lebih penting adalah kesiapan dan perilaku dari para Kepala Daerah yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, diharapkan agar mampu memprediksi dan mentransformasikan berbagai perubahan yang terjadi dengan

dilandasi sikap dan perilaku sebagai seorang negarawan. Perubahan yang sangat mendasar pada saat ini yaitu reformasi birokrasi.

Pemimpin di Kabupaten Bantaeng secara struktural merupakan pemimpin formal masyarakat di daerah dan berperan mutlak sebagai penyelenggara negara, yang sekaligus sebagai ujung tombak birokrasi negara dalam melaksanakan pembangunan nasional di daerah guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sehubungan dengan hal tersebut para pemimpin di Kabupaten Bantaeng dituntut harus memahami tugas utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memimpin masyarakat. Kompetensi para pemimpin di Kabupaten Bantaeng menjadi hal yang sangat penting agar memiliki visi yang dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Kompetensi yang dimiliki para pemimpin di Kabupaten akan semakin optimal bila semua ornamen penyelenggaraan negara dan pemerintahan seperti sinergi dengan pemerintah pusat, para tokoh baik itu tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat serta seluruh stakeholders yang ada. Dari uraian tersebut maka hal utamanya adalah ***“Bagaimanakah optimalisasi kompetensi kepemimpinan nasional di Kabupaten Bantaeng yang visioner dapat memperkuat otonomi daerah?”***.

PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah memiliki visi bersama yang harus diwujudkan untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Dalam visi pembangunan Bantaeng lima tahun ke depan telah disepakati bersama yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bantaeng yang Sejahtera Lahir dan Batin, Berorientasi pada Kemajuan, Keadilan, Kelestarian dan Keunggulan Berbasis Agama dan Budaya Lokal”.¹ Saat ini, sangat dibutuhkan kualitas pemimpin khususnya kepala daerah yang visioner untuk menahkodai tatanan kehidupan masyarakat Bantaeng yang ada di dalamnya. Visi tersebut dapat mengikat seluruh masyarakat, juga mampu menjadi sumber inspirasi dalam menjalankan tugas pemimpin dan seluruh stakeholders serta seluruh lapisan masyarakat. Visi bersama yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Tahun 2018-2023, juga berfungsi membangkitkan dan mengarahkan seluruh kekuatan yang ada.

Tetapi dalam perjalanannya kompetensi para pemimpin di Kabupaten Bantaeng belum maksimal membangun kualitas hidup masyarakat terutama dalam mengeluarkan kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat banyak. Seyogianya pemimpin khususnya para pemimpin di Kabupaten Bantaeng, memegang peranan sangat sentral dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Apalagi bila dihadapkan dengan era globalisasi yang sangat cepat berubah, diperlukan komitmen dalam melaksanakan pembangunan dari para pemimpin untuk memanfaatkan setiap potensi yang ada. Kompetensi para



pemimpin di Kabupaten Bantaeng bisa dilihat ketika menyelesaikan berbagai persoalan. Disamping itu, komitmen yang kuat dalam melaksanakan pembangunan yang pro rakyat juga menjadi harapan seluruh masyarakat dalam memajukan kesejahteraan dan keamanan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen pemimpin terhadap kepentingan rakyat.

Persoalan masyarakat di daerah yang demikian kompleks banyak disebabkan oleh krisis kepemimpinan. Masyarakat juga sering tidak puas dengan kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah karena mereka menganggap tidak pernah diikutsertakan dalam proses tersebut dan tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi keputusan yang telah dibuat. Para pemimpin di Kabupaten Bantaeng seharusnya memiliki kapasitas guna memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat untuk terciptanya masyarakat yang maju dan mandiri. Kurangnya komitmen para pemimpin di Kabupaten Bantaeng dalam meningkatkan kualitas pembangunan akan sejalan dengan kurangnya memperhatikan kepentingan yang pro rakyat. Masyarakat masih kurang maksimal dilibatkan/berpartisipasi dalam pembangunan daerah.² Untuk itu, para pemimpin di Kabupaten Bantaeng harus mampu mengimplementasikan visi pembangunan yang telah disepakati dalam RPJMD. Keberhasilan pemimpin di Kabupaten Bantaeng juga ditandai dengan menurunnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berupaya melindungi hak asasi manusia (HAM) dengan konsisten

dengan perangkat aturan kebersamaan dalam batas-batas tanggung jawab sosial bermasyarakat. Terwujudnya supremasi hukum yang konsisten, tercerminnya ketertiban dan keadilan yang meluas, terjaminnya kepastian hukum dan memperoleh legitimasi para pemimpin di Kabupaten Bantaeng.

2. Melahirkan para pemimpin di Kabupaten Bantaeng berbasis kompetensi.

Kepemimpinan visioner, adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Kualitas para pemimpin di Kabupaten Bantaeng yang dibutuhkan harus *based on competency* berupa *knowledge* dan *skill* yang dilengkapi dengan etika, etos kerja, moralitas, *responsibility* dan integritas. Para pemimpin di Kabupaten Bantaeng yang berkualitas menjadi harapan masyarakat, tidak hanya kualitas yang bersifat fisik atau intelektual semata, tetapi juga kualitas rohani, karena akumulasi dari ketiga aspek yang meliputi fisik, intelektual dan rohani akan memberikan pengaruh yang sangat kuat. Unsur pimpinan di tingkat pemerintah pusat secara formal maupun informal lebih intensif melakukan komunikasi kepada pejabat pemerintahan/ birokrat, tokoh/elit masyarakat di daerah sekaligus menyampaikan pola sikap dan pola tindak sebagai negarawan. Demikian pula dengan keberadaan partai politik, harus meningkatkan tanggung jawab moral dan institusional untuk dapat menghasilkan kader-kader terbaik, karena partai

politik merupakan sumber utama dalam menghasilkan calon pemimpin yang akan menentukan arah dan jalannya tata kelola penyelenggaraan negara. Hal ini akan membekali para calon pimpinan dengan sistim pengkaderan yang baik dan teruji sesuai karakteristik bangsa Indonesia.

3. Meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

Dalam budaya demokrasi setiap warga negara berhak ikut menentukan kebijakan-kebijakan publik melalui wakil-wakilnya dipemerintahan. Dalam suatu demokrasi rakyat mempunyai kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Dengan kebebasan ini memungkinkan rakyat mengambil bagian dalam proses pembangunan. Namun kepercayaan yang dimandatkan kepada para pemimpin di Kabupaten Bantaeng, keputusan yang diambil sering menimbulkan kontra opini dan kontroversi. Hal ini menunjukan transparansi latar belakang, hasil dan evaluasi dari program-programnya atau kebijakan atau keputusan tersebut diragukan. Transparansi serta pelibatan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan merupakan keharusan, selain untuk meminimalisasi kontra opini juga untuk membangun kepercayaan publik. Hilangnya kepercayaan terhadap suatu otoritas pemerintahan akan berakibat rusaknya tatanan hukum dan aturan yang menjadi prasyarat bagi suatu kedaulatan negara. Untuk itu, sangat diharapkan kepada para pemimpin di Kabupaten Bantaeng mampu bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan kredibilitas dan kapasitas yang di butuhkan. Kepala daerah sebagai unsur eksekutif harus

menunjukkan kredibilitas dan kemampuan dalam meningkatkan kinerja, komitmen dan kompetensi dalam organisasi yang dipimpinnya. Semakin efektifnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya para pemimpin di Kabupaten Bantaeng akan ditandai dengan transparansi, akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Optimalisasi kompetensi kepemimpinan nasional di Kabupaten Bantaeng yang visioner ditandai dari kelembagaan aparatur pemerintah yang lebih gesit dan efektif, dimotori oleh aparatur pemerintah yang lebih mampu memimpin, profesional, kompeten, serta mampu dan siap berkoordinasi secara efektif, dilengkapi dengan tata laksana koordinasi yang lengkap dan mudah. Namun, dengan masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh para pemimpin menandakan bahwa aparatur pemerintah belum menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Untuk itu, para pemimpin harus terus berupaya mengemban amanat sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat sehingga terwujud pemimpin yang dapat dipercaya. Demikian pula yang terpenting adalah memberikan keteladanan di dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap segala bentuk perundang-undangan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Pemerintah terus melanjutkan program pemberantasan KKN dengan tidak melakukan tebang pilih dengan cara memberikan sanksi yang berat, meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengembangkan etika dan



moral. Dengan demikian akan terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, berkredibilitas dan bebas KKN. Dalam menjamin kesejahteraan masyarakat para pemimpin berupaya mewujudkan kehidupan yang layak dengan cara pengentasan kemiskinan serta pembangunan keunggulan daerahnya sehingga memiliki daya saing tinggi.

Saran

Disarankan kepada para pemimpin dan segenap aparatur pemerintah agar lebih proaktif dalam menerapkan manajemen pemerintahan, mulai dari upaya memperoleh payung hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan, internalisasi dan sosialisasi, reformasi kebijakan pembangunan, sampai dengan aktualisasinya dalam proses koordinasi lintas sektoral.

Para pemimpin disarankan terus membangun pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN. Pemerintah pusat/kementerian terkait melaksanakan penataran, pendidikan dan latihan secara rutin dan berjenjang guna meningkatkan kualitas aparat pemerintahan daerah sesuai profesionalismenya, karena dilaksanakannya program tersebut maka aparat pemerintahan daerah lebih mantap dalam menguasai ilmu yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan dapat diterapkan dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah, Gavana Media Yogyakarta, 2013.
- Mustopadidjaja, AR, Prof. Dr., *Manajemen Proses Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2002.
- Sumarto, Hetifah Sj., Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- Susilo, Djoko, *Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta, 2003

Endnotes

- 1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bantaeng untuk Tahun 2018-2023.
- 2 Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "Participation" menurut Echols & Shadily (dalam Soetrisno, 2000: 419) yaitu "suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi". Hal ini menggambarkan bahwa keterlibatannya berasal dari luar individu yang merupakan rangsangan dari pemerintah agar ia ikut ambil bagian dalam pembangunan.